



Dipersoalkan KLH, Pemkot Siap Klarifikasi

YOGYAKARTA, *Joglo Jogja* - Pemkot Yogyakarta membantah keberadaan depo di wilayahnya dinilai sebagai kebijakan yang salah. Pasalnya, keberadaan depo ini dianggap sebagai titik penjemputan untuk diantar ke tempat pengolahan lebih lanjut. Hal ini diungkapkan sebagai jawaban dari penilaian Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) Hanif Faisol Nurofiq yang menganggap depo sampah melanggar hukum dan harus ditutup.

"Nggak. Itu karena memang beliau *rawuh* (datang) tidak ngasih tahu. Kalau beliau ngasih tahu kami bisa berikan *statement*," ujar Pj Wali Kota Yogyakarta Sugeng Purwanto, kemarin (20/11).

Mantan Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan DIY ini tidak terlalu memusingkan komentar Menteri KLH. Pihaknya bersedia jika kemudian diminta klarifikasi terhadap keberadaan

depo di Yogyakarta yang secara total berjumlah 13 tersebut.

"Jadi ya sudah, karena beliau (Menteri LH) lihat begitu, ekspektasi beliau begitu, ya *monggo*. Tapi kami siap untuk klarifikasi seandainya diperlukan. Yang pasti, yang dilihatnya itu bukan potret aslinya Jogja," terang dia.

Namun, pihaknya menerima perihal adanya masukan dan dukungan terkait dengan tenaga penyuluh dan pemak-simalan bank sampah. Sugeng pun mengatakan, Yogyakarta memiliki 600 bank sampah. Arah dan pendampingan pun, kata dia, sering dilakukan.

"Itu bagian yang perlu diapresiasi, karena kami tidak bisa sendiri. Harus jalan bersama untuk mengondisikan sampah kota," ujar Sugeng.

Seperti diketahui dalam kunjungannya awal pekan kemarin, KLH meminta keberadaan depo harus ditutup karena dianggap melanggar hukum. (*nik/rcc*)

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1.	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 12 Agustus 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005